

Abstrak

Langkah cepat dan tepat perlu dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan membentuk produk hukum daerah, baik yang bersifat legislasi maupun yang bersifat regulasi. Kesejahteraan dan keselamatan masyarakat harus terjamin, di samping norma produk hukum yang dihasilkan harus memiliki daya guna dan daya ikat bagi masyarakat. Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 diambil sebagai langkah pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam membuat aturan mengenai penanggulangan Virus Covid-19 di Jakarta berdasarkan asas daerah otonom, yang dalam penerapannya adalah dengan cara memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat dengan PSBB yang tujuannya adalah menekan kenaikan angka positif irang yang terpapar virus Covid-19 dan memutuskan rantai penyebaran Virus ini. Materi muatan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan yang baik dan mencerminkan konsep Good Governance dalam penanganan Covid-19, agar dapat dilaksanakan dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan regulasi mengenai peraturan PSBB, hal ini dikarenakan terdapatnya perubahan kenaikan maupun penurunan angka orang yang terkena dampak dari Virus Covid-19. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode Normatif.

Kata Kunci: *Kebijakan, Covid-19, Jakarta, Otonomi Daerah*

Abstract

Fast and appropriate steps need to be taken by the government and regional governments in dealing with the Covid-19 pandemic by forming regional legal products, both legislative and regulatory. The welfare and safety of the community must be guaranteed, in addition to the norms the legal products produced must have usability and binding power for the community. DKI Jakarta Governor Regulation Number 33 of 2020 was taken as the first step of the Governor of DKI Jakarta Anies Baswedan in making rules regarding the handling of the Covid-19 Virus in Jakarta based on the principle of autonomous regions, which in its implementation is by imposing Large-Scale Social Restrictions or abbreviated as PSBB. suppress the increase in the positive number of people exposed to the Covid-19 virus and break the chain of the spread of this virus. The content material made by the DKI Jakarta Provincial Government fulfills the principles of establishing good legislation and reflects the concept of Good Governance in handling Covid-19, so that it can be implemented and provide protection to the community. In its implementation there are several regulatory changes regarding PSBB regulations, this is due to changes in the increase or decrease in the number of people affected by the Covid-19 Virus. The method used in this research is the normative method.

Keywords: Policy, Covid-19, Jakarta, Regional Autonomy